

Pendampingan Pembuatan Dokumen Utama dalam Persiapan Persidangan

Yustisio Mahendra¹, Ninne Zahara Silviani²

Universitas Internasional Baram

email: 1951018.yustisio@uib.edu, ninne@uib.ac.id

Abstrak

Kerja praktik merupakan kegiatan mahasiswa untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman praktis di lapangan berdasarkan dasar keilmuan yang telah dipelajari. Tujuan mengambil kerja praktik di kantor hukum LAW OFFICES ANDRIS and PARTNERS yaitu melanjutkan cita-cita sebagai seorang pengacara dan membantu banyak orang, hal ini berkaitan dengan kegiatan program UIB bernama Perjanjian Kerja Sama dibidang Pengabdian Kepada Masyarakat yang berisikan penyuluhan, pembuatan merek, sampai magang. Pada saat kerja praktik masih terdapat kesalahan pertukaran fungsi surat kuasa umum dan surat kuasa khusus, serta pemakaian istilah perbuatan melawan hukum dan wanprestasi masih terjadi, sehingga menarik untuk dikaji lebih lanjut terkait Pendampingan Pembuatan Dokumen Utama dalam Persiapan Persidangan yang menitik beratkan mendampingi pemberi kuasa dalam menghadapi permasalahan perbuatan melawan hukum. Peran teori hukum sangat penting agar berkesinambungan dengan metode pelaksana yang terdiri dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan sampai pada tahap penilaian dan pelaporan. Hasil pelaksanaan pada saat artikel ini dibuat sudah mencapai pengadilan yaitu pada tahap pembacaan alat bukti, sehingga sangat direkomendasikan melakukan kerja praktik karena berkaitan dengan kegiatan program UIB yaitu untuk mahasiswa atau mahasiswi meneruskan teori hukum yang disajikan pada saat kuliah dan dipraktikkan.

Abstract

Practical work is a student activity to gain knowledge and practical experience in the field based on the scientific basis that has been learned. The purpose of taking practical work at the law office of LAW OFFICES ANDRIS and PARTNERS is to continue the dream of being a lawyer and helping many people, this is related to the UIB program activity called the Cooperation Agreement in the field of Community Service which contains counseling, branding, to internships. During practical work, there are still errors in the exchange of functions of the general power of attorney and special power of attorney, as well as the use of the terms unlawful acts and defaults, so it is interesting to study further regarding Assistance in Making Main Documents in Preparation for Trial which focuses on assisting the attorney in dealing with the problem of unlawful acts. The role of legal theory is very important so that it is sustainable with the implementation method consisting of the preparation stage, implementation stage to the assessment and reporting stage. The results of the implementation at the time this article was written had reached the court, namely at the stage of reading evidence, so it is highly recommended to do practical work because it is related to UIB program activities, namely for students or students to continue the legal theory presented during lectures and practice.

Keywords: *practical work, unlawful acts, legal theory.*

Pendahuluan

Melalui pendampingan pembuatan dokumen utama dalam persidangan sesuai tempat magang yaitu memfokuskan dalam

hal surat kuasa. sesuai Pasal 1792 KUHP, berbunyi “Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan

sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa.” Namun bersumber buku KUHPer masih belum tersedia deskripsi terhadap pengertian kuasa Hal ini membuat penulis terinspirasi untuk menyebarkan ilmu betapa pentingnya surat kuasa dalam pembuatan dokumen utama saat beracara di pengadilan. (Wicaksono, 2009, p. 2)

Bicara tentang pengadilan pasti paham pekerjaan dalam bidang hukum yang memiliki beban untuk memberikan hasil terbaik di posisi hukum tertinggi yaitu advokat (Tarantang, 2015). Hal ini di pertegas sesuai Pasal 1 UU No. 18 Tahun 2003 tentang ADVOKAT berbunyi “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini”. Bukan hanya UU saja yang tertulis melainkan dalam kode etik juga tertulis guna untuk profesi yang terkait. (Sidharta, 2015) Pada dasarnya di dalam praktik seseorang yang memberikan pendapat hukum wajib bergerak sesuai isi dari surat kuasa agar bisa menemani orang yang dianggap di tuduh atau klien pada saat jalannya penyidikan (Ramadhana, 2021) Namun untuk memenuhi ketentuan berlakunya surat kuasa agar valid harus mengikuti hukum acara yang tersedia (Dewi, 2017). Tujuan dalam kegiatan magang di kantor hukum LAW OFFICES ANDRIS and PARTNERS adalah untuk memperkenalkan dunia kerja secara langsung kepada mahasiswa sebagai lulusan calon sarjana hukum, karena pada dasarnya merupakan cita-cita yang dituju, serta pekerjaan seorang pengacara wajib lulusan sarjana hukum sebelum melakukan proses penyempahan (Ndaparoka, 2019) Saat praktik masih sering di jumpai permasalahan pembuatan surat kuasa bersifat khusus maupun bersifat umum didalam aktivitas bermasyarakat, hal ini dapat dipertegas pada pasal 1795 KUHPerdata berbunyi “Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau

lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi

kuasa” dan pada pasal 1796 KUHPerdata berbunyi “Pemberian kuasa yang dirumuskan secara umum hanya meliputi tindakan-tindakan yang menyangkut pengurusan Untuk memindahtangankan barang atau meletakkan hipotek di atasnya, untuk membuat suatu perdamaian, ataupun melakukan tindakan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik, diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas”. Hal ini menitik beratkan pendampingan pembuatan dokumen utama persiapan persidangan yakni mendampingi pemberi kuasa dalam menghadapi permasalahan perbuatan melawan hukum.

Masalah

Berdasarkan kegiatan kerja praktik yang telah dilakukan oleh penulis, memiliki permasalahan yang ditemukan kantor hukum Andris & Partners yaitu kurangnya pemahaman masyarakat tentang proses pembuatan surat kuasa beserta fungsi surat kuasa khusus maupun umum. Hal ini tentunya menjadi titik fatal karena jika masyarakat awam mencampurkan fungsi surat kuasa khusus dan umum dapat di tolak oleh hakim di pengadilan, karena pada hakikatnya pembuatan surat kuasa yaitu sebagai bukti pernyataan dari pemberi kuasa bahwa pihak penerima kuasa memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan tugas yang tertulis pada isi surat. sehingga sebagai mahasiswa hukum wajib meluruskan kesalahan yang dilakukan agar pada saat proses persidangan dapat berjalan lancar tanpa adanya hambatan.

Metode

(1) Menggunakan metode pelaksana yang terdiri dari tiga tingkatan yaitu:

A. Tahap persiapan

Pada tahap ini, Perjanjian Kerja Sama dibidang Pengabdian Kepada

Masyarakat mahasiswa diperbolehkan memilih ingin melakukan penyuluhan di sekolah, mendaftarkan merek, dan magang di kantor hukum. Dalam laporan ini, menitik beratkan magang (kerja praktik) di kantor hukum LAW OFFICES ANDRIS and PARTNERS, setelah diterima dan mendapatkan izin magang menemukan sebuah topik Pendampingan Pembuatan Dokumen Utama dalam Persiapan Persidangan yaitu surat kuasa khusus pembuatan melawan hukum.

B. Tahap pelaksana

Pada tahap ini menjelaskan serta pencarian data secara akurat serta perihal yang hendak dikuasakan kepada kantor hukum LAW OFFICES ANDRIS and PARTNERS yaitu surat kuasa khusus pembuatan melawan hukum. berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 tahun 1994:

- Memberikan penjelasan secara jelas isi dari surat kuasa khusus pembuatan melawan hukum
 - Memberikan penjelasan yang rinci terhadap pengadilan yang berhak mengadili sengketa berdasarkan domisili para pihak yang bersengketa
 - Identitas pihak dalam surat kuasa serta kedudukan pihak pemberi kuasa sudah sangat jelas namun wajib di sensor karena menyangkut rahasia klien (orang atau badan hukum yang membutuhkan bantuan hukum tertera dalam pasal 1 UU NO. 18 tahun 2003 tentang ADVOKAT)
 - Memberikan secara detail inti serta topik pertikaian yang dipermasalahkan, namun wajib di sensor karena menyangkut rahasia klien (orang atau badan hukum yang membutuhkan bantuan hukum tertera sesuai pasal 1 UU tentang ADVOKAT)
- Penilaian dan pelaporan tahap akhir dalam kerja praktik, langkah yang dilakukan yaitu mengumpulkan data seperti identitas pemberi dan penerima kuasa, perihal yang dikuasakan, dan

menentukan jenis surat kuasa berdasarkan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 tahun 1994.

Pembahasan

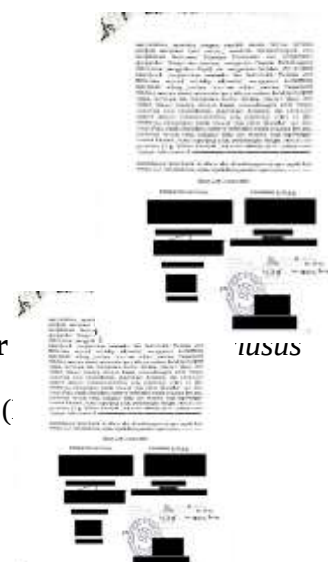
(1) Pelaksanaan/implementasi

Kerja praktik merupakan keterampilan yang dijadwalkan kepada para mahasiswa maupun mahasiswi untuk mengamalkan pengetahuan serta mendalami suatu mitra tertentu dan mempersembahkan jawaban atas suatu permasalahan yang didalamnya terdapat penyelesaian sehingga dapat dituangkan melalui laporan dan karya ilmiah atau artikel. (Kasim, 2020) Pelaksanaan Proses pelaksanaan magang atau kerja praktik dilakukan mulai dari 21 Januari 2022 sampai 29 April 2022, hal ini terus dilakukan mulai dari hari senin sampai jumat jam 07.00 sampai 17.00 Waktu Indonesia Barat. Luaran yang dicapai pada saat praktik di kantor hukum LAW OFFICES ANDRIS and PARTNERS yaitu Pendampingan Pembuatan Dokumen Utama dalam Persiapan Persidangan yang menitik beratkan mendampingi pemberi kuasa dalam menghadapi permasalahan pembuatan melawan hukum dan telah terdaftar di pengadilan negeri pada saat laporan ini dibuat.

(2) Luaran yang dicapai

Luaran yang dicapai atas kegiatan kerja praktik di kantor Andris & Partners adalah sebagai berikut:

Gambar



Untuk memperjelas terdapat bagan pada saat proses penyusunan surat kuasa, yaitu sebagai berikut:



Gambar 2 bagan surat kuasa

Berdasarkan sistematis urutan bagan diatas pada saat proses pembuatan surat kuasa dilakukan melalui tujuh tahapan diantaranya langkah pertama yaitu meletakkan kop surat dalam surat kuasa karena, berguna untuk menunjukkan identitas dari surat itu sendiri dan keabsahan (Gultom, 2019) Langkah kedua Mencantumkan nomor surat kuasa khusus, bertujuan penomoran surat tentunya akan gampang mengetahui pembuatan surat tersebut serta dapat mempercept dalam melakukan pengarsipan (Wulandari, 2019) langkah ketiga dan keempat Mencantumkan identitas pemberi kuasa guna untuk mengetahui secara jelas orang atau badan hukum yang membutuhkan bantuan hukum dan penerima hukum, langkah kelima memberikan isi penjelesaian surat kuasa secara singkat dan padat, langkah keenam memberikan penjelasan hak penerima kuasa khusus secara detail dalam persidangan, langkah terakhir melampirkan tanda tangan para pihak yaitu pemberi dan penerima kuasa karena dapat dinilai sebagai bentuk pernyataan yang sah dengan untuk nyata k pada suatu l pkan kepada dapat dikatakan sebagai bentuk untuk mendap pasti (Kotiman, 2010).

(3) Tingkat kesulitan pelaksanaan kegiatan

Tingkat kesulitan dalam proses pendampingan pada saat kerja praktik ialah perbedaan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum, karena masyarakat sering menggabungkan menjadi satu (Apriani, 2021) jika diperdalam sesuai teori, bahwa perbuatan melawan hukum merupakan sifat yang mencerminkan kehendak diluar batas kekuasaannya (Sari, 2021) Hal ini dipertegas sesuai pasal 1365 KUHPerdara yang berkata “setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut”. Wanprestasi dapat dikatakan bahwa perbuatan tidak mencukupi sesuai isi dari perjanjian antara orang atau badan hukum yang meminjamkan uang dengan orang maupun badan hukum penerima uang (Dalimunthe, 2017) Ketentuan hukum ingkar janji tertera jelas pasal 1243 KUHPer berkata bahwa “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”. Berikut merupakan foto proses pendampingan pada saat kerja praktik



Gambar 3 pendampingan di kantor hukum Andris and Partners.

Simpulan

Tingkat kesuksesan target pada saat artikel ini dibuat, dalam hal pendampingan pembuatan dokumen utama dalam persiapan persidangan yang menitik beratkan mendampingi pemberi kuasa dalam menghadapi permasalahan perbuatan melawan hukum sudah mencapai pada tahap pembacaan bukti pada saat artikel ini dibuat.

Manfaat yang di peroleh dari tempat magang di kantor advokat terdapat 5M, diantaranya berupa:

1. Memperoleh ilmu yang lebih di bandingkan dalam kelas, karena adanya praktek yang nyata.
2. Menemukan berbagai masalah yang dapat menambah wawasan seperti hukum public dan hukum private.
3. Membantu mengurangi beban pikiran klien dengan cara mencari jalan keluar suatu masalah dalam bidang hukum.
4. Menghindari kesalahan fatal dalam pembuatan surat kuasa
5. Mencegah perilaku semena-mena, seperti pengambilan hak orang lain.

Melakukan kegiatan kerja praktik sangat direkomendasikan karena, dapat menuangkan ilmu hukum yang didapatkan melalui tempat kuliah di Univesitas Internasional Batam, sehingga dapat diartikan sebagai mempraktikkan dasar pengetahuan, berdasarkan peraturan yang berlaku dengan cara terjun secara langsung di lapangan.

Tidak lupa penulis mengucapkan kalimat ucapan terimakasih yang sangat mendalam Kepada pihak pertama (LAW OFFICES ANDRIS and PARTNERS) dan pihak kedua (Universitas Internasional Batam), Serta peran dosen pembimbing (Ninne Zahara) sangat penting dalam memberikan arahan kepada mahasiswa atau mahasiswi dalam program kegiatan Perjanjian Kerja Sama dibidang Pengabdian Kepada Masyarakat, karena lahirnya kegiatan kerja praktik merupakan ekspresi suatu ilmu yang diperoleh melalui kampus UIB sehingga di praktikkan dalam

bentuk nyata dan wajib berdasarkan peraturan yang berlaku pada saat dilapangan.

Daftar Pustaka

- Apriani, T. (2021). KONSEP GANTI RUGI DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN WANPRESTASI SERTA SISTEM PENGATURANNYA DALAM KUH PERDATA. *GANEC SWARA*, 15(1), 929-934.
- Dewi, N. M. A. S., & Sukranatha, A. A. K. (2018). Syarat Sahnya Surat Kuasa Substitusi Yang Dibuat Di Luar Negeri Dalam Praktik Peradilan Perdata Di Indonesia. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 1-13.
- Dalimunthe, D. (2017). Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw). *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan*, 3(1), 12-29.
- Gultom, R. G., Sinaga, M., & Charlina, C. Implikatur dalam Kampanye Pemilihan Presiden 2019. *JURNAL TUAH: Pendidikan dan Pengajaran Bahasa*, 3(2), 90-102.
- Kasim, A., Hadjaratie, L., & Dai, R. H. (2020). Rancang bangun sistem informasi skripsi dan kerja praktik berbasis web. *Jambura Journal of Informatics*, 2(2), 95-107.
- Kotimah, E. K., & Santoso, L. (2018). Urgensi Tanda Tangan dan Materai dalam Memberikan Kepastian Hukum terhadap Kontrak Waralaba (Franchise). *Halu Oleo Law Review*, 1(1), 43-63.
- Ndaparoka, M. L. (2019). Perlindungan Hukum terhadap Calon Advokat yang Sedang Magang pada Kantor Hukum Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. *Jurnal Magister Hukum ARGUMENTUM*, 6(1), 1104-1124.
- Ramadhana, T. (2021). Isi atau muatan surat kuasa dan batasan wewenang penerima kuasa di pengadilan negeri

- tata usaha negara.1-15
- Sidharta, B. A. (2015). Etika dan Kode Etik Profesi Hukum. *Veritas et Justitia*, 1(1), 220-248
- Sari, I. (2021). Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1).
- Tarantang, J. (2015). Menggali Etika Pengacara dalam Alquran. *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, 11(2), 145-173.
- Wicaksono, F. S. (2009). Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kuasa. *VisiMedia*, hlm 2.
- Wulandari, D. A. (2019). WS: Pengelolaan Surat pada Bagian Kepegawaian Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya (Doctoral dissertation, Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya).